



Halaman : 13

460 TPS

Rawan Kecurangan

■ Bawaslu DIY Antisipasi KTP Palsu pada Pilkada Kota Yogya

YOGYA. TRIBUN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY menyebutkan setengah dari total Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Yogyakarta pada pemilihan umum wali-wakil wali kota rawan terjadi kecurangan. Panitia Pengawas diminta cermat bila menemukan kejanggalaan.

Ketua Bawaslu DIY, Muhammad Najib mengatakan, sekitar 460 dari 794 TPS yang masuk kategori rawan. TPS tersebut rawan karena banyak warga difabel yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT).

"Ini terkait aksesibilitas. Masyarakat difabel itu banyak yang tidak memilih karena problem akses, sehingga rawan hak suaranya diselewengkan," ungkap Najib, Kamis (9/2).

Muhammad Najib
Ketua Bawaslu DIY

● ke halaman 14

WASPADA JELANG PILKADA

- Ada 460 TPS dinilai rawan dari total 794 TPS
- TPS yang rawan berarti terindikasi bisa terjadi politik uang. Penyalahgunaan hak suara, hingga kecurangan dalam pemungutan suara.
- Kedua kubu paslon juga telah mengantongi wilayah rawan kecurangan Data
- Pemilih Tetap (DPT) Kota Yogyakarta sebanyak 298.989 orang, terdiri dari 143.307 pemilih laki-laki dan 155.682 pemilih. 837 diantaranya adalah pemilih difabel.
- Partisipasi publik diharapkan mencapai 77,5 persen
- Dua kubu pasangan calon kandidat tidak melaksanakan rapat terbuka pada pemilihan kali ini
- Masa tenang pemilihan umum wali kota 12-14 Februari 2017

• Penetapan Kepala Daerah 8-10 Maret 2017

Instansi
1. KPU Kota Yk
2. Panwas Kota Yk
3. Dindikcapil
4.
5.

Nilai Berita
☐

Tindak Lanjut
☐ Untuk Ditanggapi
☒ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

Kepala kretaris

Ttd

460 TPS Rawan Kecurangan

• Sambungan Hal 13

Karenanya, Bawaslu dan KPU mendorong agar tidak terjadi hambatan kepada masyarakat difabel untuk memilih. Tercatat, ada 837 pemilih difabel dalam Pilkada Kota Yogyakarta 2017.

Selain itu, Najib juga mengantisipasi adanya kartu tanda penduduk (KTP) palsu atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda dari pemilih yang datang ke TPS. Diharapkan, petugas bisa mencermati dan mencocokkan dari DPT ketika pemilih menunjukkan KTP-nya.

"Aturannya, orang yang datang ke TPS membawa KTP, harus warga setempat sehingga mudah dikenali oleh petugas TPS. Kalau konteks Kota Yogyakarta dirasa masih bisa dikontrol, tapi harus tetap antispasi," ungkap Najib.

Sekali memilih

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Hamdan Kurniawan menjelaskan, seti-

ap warga negara mempunyai hak untuk memilih sekali. Bila ada yang memilih lebih dari sekali, maka bisa terkena pelanggaran pidana.

"Selain itu, pemilihan ganda itu bisa menyebabkan pemungutan suara ulang," tegasnya.

KPU bersama dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta telah melakukan pendidikan terpadu kepada petugas TPS agar bisa mengenali KTP yang asli. Diharapkan, petugas TPS mampu mempelajari secara fisik dari e-KTP yang dibawa oleh pemilih.

Verifikasi dokumen

Sebelumnya, Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) diminta untuk melakukan klarifikasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta jika menemukan dokumen pemilih yang meragukan. Pasalnya, dimungkinkan akan ada banyak pemilih baru yang akan ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 15 Februari mendatang.

Kepala Dindukcapil Kota Yogyakarta, Sisruwadi men-

jelaskan, pihaknya membuka layanan verifikasi dokumen kependudukan pada hari H Pilkada 2017. Petugas KPPS pun bisa melakukan verifikasi dan dilayani pada pukul 07.00 hingga 13.00 WIB.

"Layanan ini ditujukan untuk mengantisipasi dokumen pemilih yang diragukan keasliannya. Misalnya, ada keraguan atas keaslian KTP elektronik atau surat keterangan (suket) yang diserahkan pemilih saat akan masuk bilik suara," jelasnya, Rabu (8/2) sore.

Adapun proses verifikasi ini akan dilakukan secara bertahap. Jika petugas KPPS menemukan adanya data atau dokumen kependudukan yang meragukan, maka bisa langsung dikomunikasikan ke petugas KPU. Nantinya, petugas KPU akan meneruskan ke Dindukcapil untuk verifikasi data melalui basis data kependudukan yang ada.

"Nanti KPU bisa berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Kami juga akan standby untuk menerima klarifikasi atau verifikasi ini. Kami juga sudah meminta Kementerian

Dalam Negeri untuk memperkuat akses online, sehingga memperlancar verifikasi," jelas Sisruwadi.

Sisruwadi menambahkan ada delapan orang petugas sebagai operator komputer. Pihaknya juga sudah berkoordinasi agar jalur untuk verifikasi kependudukan pemilih diprioritaskan. Karena proses verifikasi juga dilakukan daerah lain yang menggelar pilkada serentak.

Pada hari H, kata dia, pihaknya hanya melayani verifikasi adanya dokumen kependudukan yang meragukan. Sementara untuk Suket akan dilayani hingga H-1 Pilkada pada jam kerja. Menurutnya, Suket ini bisa digunakan sebagai pengganti KTP elektronik sebagai syarat agar pemilih bisa menggunakan hak pilih.

Suket ini ditujukan bagi warga Kota Yogyakarta yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sudah merekam data kependudukan namun belum menerima fisik E-KTP, serta warga yang menginjak usia 17 tahun pada 15 Februari. (gila/s)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005